

Analisis muatan kompetensi kewarganegaraan dalam Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila kelas IX

Feri Rizwan ^{a,1}, Sunarso ^{b,2}

^{a,b} Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

¹ feririzwan.2022@student.uny.ac.id *

*korespondensi penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan muatan komponen kompetensi kewarganegaraan yang terdapat dalam Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila Kelas IX, menganalisis frekuensi kemunculan komponen kompetensi kewarganegaraan yang terdapat dalam Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila Kelas IX, dan menganalisis penjabaran komponen kompetensi kewarganegaraan yang terdapat dalam Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila Kelas IX. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Objek penelitian ini adalah Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila Kelas IX terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023. Pengumpulan data meliputi tahap pembacaan, pengkodean, dan pencatatan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila Kelas IX memuat komponen kompetensi kewarganegaraan yang mencakup komponen pengetahuan, komponen keterampilan, dan komponen nilai, sikap, dan watak/karakter; (2) frekuensi kemunculan komponen kompetensi kewarganegaraan yang paling banyak muncul dalam dalam Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila Kelas IX adalah komponen pengetahuan dengan presentase 49,18%; dan (3) penjabaran komponen kompetensi kewarganegaraan dalam Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila mencakup pengantar pembelajaran, materi pembelajaran, aktivitas pembelajaran, refleksi pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.

ABSTRACT

This research aims to describe the content of the components of civic competence contained in the Main Textbook (BTU) of Class IX Pancasila Education, analyze the frequency of appearance of the components of civic competence contained in the Main Textbook (BTU) Pancasila Education Class IX. This research uses a content analysis method with a qualitative and quantitative approach. The object of this research is the Main Textbook (BTU) for Class IX Pancasila Education published by the Ministry of Education, Culture, Research and Technology in 2023. Data collection includes the reading, coding and recording stages. The data analysis used is qualitative and quantitative data analysis. The results of this research show that: (1) the Main Textbook (BTU) for Class IX Pancasila Education contains citizenship competency components which include knowledge components, skills components, and value, attitude and character components; (2) the frequency of appearance of the civic competency component that appears most often in the Main Textbook (BTU) for Class IX Pancasila Education is the knowledge component with a percentage of 49,18%; and (3) description of the components of civic competence in the Main Textbook (BTU), including an introduction to learning, learning materials, learning activities, learning reflection and learning assessment.

Pendahuluan

Kajian mengenai kompetensi kewarganegaraan sangat penting dilakukan mengingat dinamika pendidikan kewarganegaraan di Indonesia yang tidak terlepas dari kepentingan rezim yang berkuasa. Menurut Sunarso (2024) pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mengalami dinamika dari waktu ke waktu seiring dengan bergantinya rezim yang berkuasa, setiap rezim memiliki kecenderungan

Informasi Artikel

Diterima : 21 Juni 2024

Disetujui : 24 Agustus 2024

Kata kunci:

Pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, dan watak/karakter

Article's Information

Received: 21 Juny 2024

Accepted: 24 August 2024

Keywords:

Knowledge, skills, value, attitude, and character

mengintervensi pendidikan kewarganegaraan untuk kepentingan kekuasaannya. Konsep kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan saat ini menjadi konsep sentral dalam teori, penelitian, kebijakan dan praktik pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan mengacu pada bagaimana pendidikan dapat mendukung pengembangan identitas peserta didik (Veugelers & Groot, 2019).

Kompetensi kewarganegaraan atau biasa disebut dengan kompetensi warga negara merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh semua warga negara untuk dapat menunjang kehidupan berdemokrasi (Feriandi & Harmawati, 2018). Dalam perspektif Doganay (2012) kompetensi kewarganegaraan merupakan dasar dari ide-ide, konsep, prinsip, keterampilan, dan kualitas afektif dalam kurikulum. Sehingga pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap harus dimasukkan pada kurikulum pendidikan kewarganegaraan tidak terpisah, tetapi terintegrasi dalam kurikulum.

Pengintegrasian kompetensi kewarganegaraan di satuan pendidikan dapat diintegrasikan melalui buku teks pelajaran. Dalam konteks pembelajaran di persekolahan setidaknya terdapat beberapa unsur yang tidak dapat dipisahkan, yakni peserta didik, guru, bahan ajar, proses belajar, hasil belajar, sarana dan prasarana belajar serta sistem manajemen sekolah. Pengintegrasian kompetensi kewarganegaraan dalam buku teks pelajaran merupakan misi dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki visi, misi, dan tujuan yang lebih khas dibandingkan mata pelajaran yang lain (Sunarso, 2024).

Buku teks memiliki peran yang strategis untuk mengimplementasikan kesempatan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran yang diberikan dalam sistem pendidikan (Ramanta, 2020). Oleh karena itu, sejalan dengan diberlakukannya kurikulum baru atau yang dikenal dengan istilah kurikulum merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia telah berhasil menyusun Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila, di mana dalam kurikulum merdeka yang saat ini diberlakukan nomenklatur Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) telah diganti menjadi Pendidikan Pancasila.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku Pendidikan didalamnya menjelaskan bahwa buku teks adalah buku yang disusun untuk pembelajaran berdasarkan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku. Sedangkan buku teks utama adalah buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh pemerintah pusat tanpa dipungut biaya. Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila disusun sebagai upaya mendukung implementasi kurikulum merdeka, buku tersebut terdapat dua jenis buku yaitu buku untuk guru dan buku untuk peserta didik.

Mata pelajaran ini walaupun nomenklatur dan struktur materinya seringkali berubah namun tetap memiliki tujuan yang sama yaitu untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Mata pelajaran ini memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Sunarso, 2021).

Namun seringkali visi, misi dan tujuan dari mata pelajaran ini tidak dibersamai dengan muatan kompetensi kewarganegaraan secara seimbang dalam kurikulum. Hal ini terlihat dari kajian Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional terhadap Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) hanya memuat 12% KD aspek *civic disposition* dan 20,17% aspek *civic skill/participatory*, sedangkan aspek *civic knowledge* 69,43%. Oleh karena itu, Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional beranggapan bahwa susunan tersebut tidak konsisten dengan misi pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk watak warga negara (Puskur Depdiknas, 2007).

Berdasarkan hal itu terlihat bahwa aspek pengetahuan lebih banyak muncul dibandingkan dengan aspek lainnya. Oleh karena itu, muatan kompetensi kewarganegaraan perlu dikaji terutama pada sumber belajar peserta didik yaitu buku teks pelajaran yang wajib digunakan dalam implementasi kurikulum merdeka mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila tingkat SMP/MTs ditulis oleh Yudha Dana Prahara, Khoiryaningsih dan Anggi Afriansyah (2023) membahas hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; hak dan kewajiban warga negara; kemerdekaan berpendapat warga negara pada era keterbukaan informasi; menjaga dan melestarikan tradisi, kearifan lokal, serta budaya dalam masyarakat global; dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis muatan komponen kompetensi kewarganegaraan yang terdapat dalam Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila Kelas IX, frekuensi kemunculan komponen kompetensi kewarganegaraan yang terdapat dalam Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila Kelas IX, serta penjabaran komponen kompetensi kewarganegaraan yang terdapat dalam Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila Kelas IX. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kategori utama kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang demokratis seperti dikemukakan Doganay (2012) meliputi komponen pengetahuan, komponen keterampilan, komponen nilai, sikap, dan watak/karakter.

Perlu diketahui muatan komponen kompetensi kewarganegaraan pada kurikulum 2013 dimuat secara utuh. Hal ini dapat dilihat pada penelitian Manalu dan Gandamana (2023) menunjukkan muatan komponen kompetensi kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 memuat 25% komponen pengetahuan, 25% komponen keterampilan, dan 50% komponen sikap/karakter. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian karena didasari oleh muatan komponen kompetensi kewarganegaraan yang berbeda pada setiap kurikulum yang diberlakukan pada mata pelajaran ini.

Penelitian Ayudi (2019) menganalisis muatan sikap spiritual dan sikap sosial dalam buku teks PPKn kurikulum 2013. Dalam penelitian ini dapat menemukan (1) kurangnya muatan sikap spiritual dan sikap sosial pada buku pelajaran buatan pemerintah (BSE) yang digunakan oleh peserta didik; (2) karena pentingnya sikap spiritual dan sikap sosial yang diajarkan pada peserta didik, kreativitas guru sangat diperlukan untuk menutupi kekurangan yang ada pada buku ajar agar tujuan pengajaran kompetensi sikap dapat terlaksana walaupun terdapat kekurangan pada sumber belajar yang digunakan.

Penelitian Solehudin (2019) menganalisis buku teks PPKn kelas VII dalam perspektif penguatan pendidikan karakter. Penelitian ini dilakukan di dua sekolah yaitu (1) SMPN 1 Sumber dengan buku teks pendamping PPKn kelas VII kurikulum 2013 revisi dengan penulis Wahyu Datik dan Yustina Widi Andanti penerbit Yudhistira Ghalia Indonesia; (2) SMPN 2 Sumber dengan buku teks pendamping PPKn untuk SMP/MTs kelas VII dengan penulis M. Taupan dan Ine Ariyani S dari penerbit Widya Aksara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian isi materi dalam buku teks PPKn dalam perspektif karakter secara umum isi nilai-nilai utama telah terkandung dan tersebar di kedua buku tersebut.

Berdasarkan hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian ini secara mendalam untuk menganalisis muatan komponen kompetensi kewarganegaraan yang terdapat dalam Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila Kelas IX, frekuensi kemunculan muatan komponen kompetensi kewarganegaraan yang terdapat dalam Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila Kelas IX, serta penjabaran muatan komponen kompetensi kewarganegaraan dalam Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila Kelas IX.

Metode

Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menyimpulkan muatan komponen kompetensi kewarganegaraan, frekuensi kemunculan komponen kompetensi kewarganegaraan, dan penjabaran komponen kompetensi kewarganegaraan dalam Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila peserta didik kurikulum merdeka terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan analisis konten dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisis konten dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan muatan komponen kompetensi kewarganegaraan yang termuat dalam Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila SMP/MTs terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2023. Sedangkan analisis konten dengan pendekatan kuantitatif bertujuan untuk menghitung persentase atau rata-rata dari kemunculan muatan komponen kompetensi kewarganegaraan yang termuat dalam Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila SMP/MTs memperoleh hasil yang mendalam dari penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Salah satu ciri yang membedakan kompetensi kewarganegaraan dibandingkan dengan kompetensi lainnya seperti membaca, menulis matematika, terdapat relevansi sikap selain pengetahuan dan keterampilan (Coopmans, van der Veen & Daas, 2024). Menurut Veugelers (2017) dalam pendidikan kewarganegaraan, pengetahuan dan keterampilan itu penting namun sikap lah yang paling relevan. Dalam literatur mengenai pendidikan kewarganegaraan ada tiga jenis kewarganegaraan yang dapat dibedakan, masing-masing mempunyai orientasi yang berbeda, pertama kewarganegaraan adaptif dengan fokus pada disiplin dan keterlibatan sosial; kedua kewarganegaraan individual yang menekankan otonomi dan disiplin; dan ketiga kewarganegaraan demokratis kritis yang fokus pada keterlibatan sosial dan otonomi (Veugelers, 2021).

Selanjutnya Campbell (2019) juga mengungkapkan tinjauan mengenai pendidikan kewarganegaraan telah menunjukkan dampak memasukkan pendidikan kewarganegaraan ke dalam kurikulum pada perkembangan peserta didik. Hal inilah digaribawahi dalam penekanan literatur pendidikan kewarganegaraan mengenai iklim kelas yang demokratis dan partisipatif. Iklim yang terbuka dan demokratis di mana diskusi dan dialog berlangsung tampaknya secara efektif mendorong berbagai kompetensi kewarganegaraan yang kritis-demokratis (Campbell, 2019; Daas, et al., 2023; Knowles, et al., 2018).

Menurut Feriandi dan Harmawati (2018) dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan salah satunya dilakukan dengan cara mengajarkan pendidikan kewarganegaraan kepada masyarakat agar memiliki kompetensi kewarganegaraan yang di dalamnya terdiri dari *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*. Lebih lanjut dijelaskan pengetahuan kewarganegaraan diperoleh warga negara dari berbagai macam aktivitas, termasuk pada jenjang persekolahan melalui mata pelajaran PPKn. Keterampilan kewarganegaraan merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terakhir watak kewarganegaraan merupakan komponen ketiga dari kompetensi kewarganegaraan yang lahir dari proses akumulasi dari pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan.

Menurut Doganay (2012) dalam konteks persekolahan pendidikan warga negara demokratis aktif yang diperlukan dalam demokrasi telah menjadi tujuan utama sistem pendidikan. Pendidikan kewarganegaraan yang demokratis aktif diharapkan dapat memperoleh kualitas-kualitas kewarganegaraan yang telah disampaikan di atas. Oleh karena itu, komponen pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap harus terintegrasi dengan kurikulum tidak terpisah.

Berdasarkan perspektif Doganay (2012) cakupan pengetahuan kurikulum pendidikan kewarganegaraan demokratis aktif. *Pertama*, pengetahuan politik meliputi sistem politik dan hukum, konsep dasar, prinsip dan institusi demokrasi, distribusi kekuasaan dan wewenang sepanjang sejarah, konsep kewarganegaraan demokratis, hak dan kewajiban warga negara termasuk hak asasi manusia, pengambilan keputusan politik di tingkat lokal, nasional dan tingkat internasional, masalah politik terkini, peristiwa utama, tren dan agen perubahan sejarah nasional dan dunia, literasi media dan peran media dalam kehidupan pribadi dan sosial, dan keamanan nasional dan internasional.

Kedua, pengetahuan sosial meliputi hubungan sosial, hak-hak sosial, fungsi dan kerja kelompok sukarela dan masyarakat sipil, serta perbedaan sosial kesejahteraan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. *Ketiga*, pengetahuan budaya meliputi sejarah dan warisan budaya sendiri, dominasi peran dominan tertentu dan nilai-nilai, berbagai budaya di tingkat lokal, regional, nasional, dan global, serta pelestarian lingkungan. *Keempat*, pengetahuan ekonomi meliputi hak ekonomi, prinsip ekonomi dan konsekuensinya pertumbuhan ekonomi, masalah keuangan utama dan terkait literasi ekonomi, serta pembangunan berkelanjutan secara lokal dan secara internasional. *Kelima*, bentuk pengetahuan partisipatif meliputi pengetahuan tentang bentuk-bentuk partisipasi politik, sosial, budaya, ekonomi terhadap kehidupan.

Pengetahuan kewarganegaraan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila penting dalam membangun peserta didik sebagai manusia yang seutuhnya (Jamaludin & Alanur, 2021). Pendidikan Pancasila dapat membentuk peserta didik untuk menjadi pribadi sebagai manusia seutuhnya (Belladonna & Anggraena, 2019). Pengetahuan kewarganegaraan apalagi di masa sekarang sangat dibutuhkan untuk membentuk daya kritis, nilai-nilai kepedulian, persatuan dan kesatuan agar dapat beradaptasi dan menyesuaikan terhadap situasi dan kondisi yang tidak biasa (Jamaludin & Alanur, 2021).

Keterampilan kewarganegaraan merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi berbagai masalah bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Feriandi & Harmawati, 2018). Sebagai contoh, Murdiono (2010) mengatakan keterampilan kewarganegaraan yang dimiliki mahasiswa misalnya, dapat dilihat dari kemampuannya mengkritisi kebijakan publik.

Menurut Jamaludin, Alanur dan Hasdin (2023) keterampilan kewarganegaraan merupakan kecakapan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan, hal ini dimaksudkan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan guna menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Pernyataan ini menjelaskan bahwa keterampilan kewarganegaraan dapat digunakan dalam memecahkan masalah bangsa dan prosesnya memberikan sesuatu yang bermakna.

Keterampilan kewarganegaraan adalah keterampilan yang berasal dari pengetahuan kewarganegaraan yang bermakna sehingga dapat bermanfaat untuk menghadapi permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Hartini & Petrus, 2020). Menurut Doganay (2012) cakupan keterampilan kurikulum pendidikan kewarganegaraan demokratis aktif sebagaimana mencakup keterampilan umum dan keterampilan partisipatif. *Pertama*, keterampilan umum yaitu berpikir kritis, pemeriksaan kritis terhadap informasi, membedakan pernyataan dan pendapat, mencapai penilaian seimbang, keputusan atau sudut pandang berdasarkan kritis, pemeriksaan informasi dan penalaran, serta mempertahankan posisi yang dicapai termasuk penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, berpikir kreatif, keterampilan penyelidikan, keterampilan berkomunikasi, dan menggunakan media secara aktif.

Kedua, keterampilan partisipatif yaitu memantau dan mempengaruhi kebijakan dan keputusan termasuk berpartisipasi di dalamnya protes damai, menyelesaikan konflik dengan cara damai, organisasi sipil yang berpartisipasi sebagai anggota atau berkontribusi, membangun kerja sama dan koalisi, menampilkan kepemimpinan yang demokratis, hidup di lingkungan multikultural, menangani semua jenis perbedaan termasuk gender, sosial, budaya, ras, dan keagamaan, keterlibatan dalam melindungi lingkungan, serta konsumsi produk yang etis dan boikot produk yang tidak etis.

Tujuan utama dari keterampilan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara, baik karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu, maupun karakter publik seperti kepedulian sebagai warga, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengarkan, bernegosiasi dan kompromi (Mulyono, 2017).

Pendidikan kewarganegaraan atau *civic education* mengemban misi untuk membentuk peserta didik untuk menjadi warga masyarakat sekaligus warga negara yang cerdas, terampil dan berwatak sebagai penjamin keberlangsungan bangsa dan negara. Pada tataran kurikuler pendidikan kewarganegaraan baik substansi, proses pembelajaran, maupun efek sosio-kulturalnya, sengaja dirancang dan di programkan untuk mewujudkan program-program pendidikan demokrasi yang bermuara pada pembentukan karakter bangsa Indonesia (Tutuarima, Nindatu & Nadifa, 2022).

Watak kewarganegaraan atau yang dapat didefinisikan sebagai sikap atau karakter yang mendukung dan mempromosikan kewarganegaraan dan pemerintahan (Saputra, Adha, Mentari & Rohman, 2023). Sejalan dengan itu Shelina, Yanzi dan Mentari (2019) mengatakan bahwa perilaku kewargaan merupakan karakteristik atau karakteristik publik dan privat yang sangat penting dalam mendukung dan mempertahankan demokrasi. Selain itu, melatih keterampilan untuk menganalisis nilai dan mengomunikasikannya diperlukan untuk menunjukkan kepada peserta didik bahwa nilai adalah konstruksi, bahwa seseorang dapat membuat pilihan untuk nilai tertentu (Veugelers & Samsuri, 2023).

Menurut Doganay (2012) ruang lingkup nilai, sikap, dan watak kewarganegaraan demokratis aktif kurikulum pendidikan adalah sebagai berikut: *Pertama*, nilai meliputi penerimaan aturan hukum, menghormati martabat manusia, menghormati hak asasi manusia, percaya terhadap demokrasi, percaya terhadap perdamaian, percaya pada sosial keadilan, persamaan dan kesetaraan perlakuan terhadap warga negara, penolakan prasangka, rasisme dan sejenis diskriminasi lainnya, percaya terhadap solidaritas, menghormati toleransi dan perbedaan, menghormati alasan, percaya pada pelestarian lingkungan, percaya pada keberlanjutan perkembangan, menghargai kebebasan, dan menghargai keadilan.

Kedua, sikap meliputi komitmen terhadap kebenaran, pikiran terbuka, komitmen terhadap perdamaian dan solusi konstruktif untuk masalah, merasa percaya diri untuk terlibat secara politik, percaya pada prinsip demokrasi institusi dan prosedur serta pentingnya tindakan sipil, merasa bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan sendiri, komitmen terhadap nilai saling pengertian, kerjasama, kepercayaan dan solidaritas, komitmen terhadap prinsip keberlanjutan perkembangan, dan rasa memiliki.

Ketiga, disposition/watak meliputi memiliki niat untuk berpartisipasi dalam politik masyarakat, memiliki niat untuk aktif di dalam komunitas, serta memiliki niat untuk berpartisipasi dalam masyarakat sipil. Melihat berbagai perjalanan kurikulum pendidikan kewarganegaraan dari era pemerintahan orde lama, orde baru, dan reformasi terdapat satu titik sentral yang sama, yaitu menempatkan Pancasila sebagai nilai inti (*core value*) dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk karakter warga negara yang diidealkan (Mulyono, 2017).

Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila Peserta Didik kelas IX disusun bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila (BPIP) Republik Indonesia pada tahun 2023. Buku ini ditulis oleh Yudha Dana Prahara, Khoiryaningsih, dan Anggi Afriansyah dan diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2023.

Muatan komponen kompetensi dalam Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila kelas IX, sebagaimana yang dikemukakan Doganay (2012) yaitu meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, dan watak/karakter yaitu: *Pertama*, pengetahuan mencakup pengetahuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pengetahuan partisipatif. *Kedua*, keterampilan mencakup keterampilan umum dan keterampilan partisipatif. *Ketiga*, nilai, sikap, dan watak/karakter.

Komponen pengetahuan mencakup pengetahuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pengetahuan partisipatif. Adapun penjabaran muatan komponen pengetahuan pada buku teks pelajaran kelas IX adalah sebagai berikut: Pada bab 1 mengenai hubungan Pancasila dengan UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan negara kesatuan republik Indonesia muatan komponen pengetahuan dijabarkan dengan menjelaskan hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika, hubungan Pancasila dengan UUD NRI 1945, hubungan Pancasila dengan NKRI, serta semangat Pancasila dalam kehidupan bernegara.

Pada bab 2 mengenai hak dan kewajiban warga negara muatan komponen pengetahuan dijabarkan dengan hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang, hak dan kewajiban warga negara dalam UUD NRI 1945, serta tantangan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Pada bab 3 mengenai kemerdekaan berpendapat warga negara pada era keterbukaan informasi komponen pengetahuan dijabarkan melalui makna kemerdekaan berpendapat warga negara, jaminan kebebasan berpendapat warga negara, bentuk-bentuk penyampaian pendapat, keterbukaan informasi publik, serta wujud kemerdekaan berpendapat warga negara pada era keterbukaan informasi publik.

Pada bab 4 mengenai menjaga dan melestarikan tradisi, kearifan lokal, serta budaya masyarakat global komponen pengetahuan dijabarkan melalui makna tradisi, kearifan lokal, dan budaya; contoh tradisi, kearifan lokal, dan budaya di Indonesia; peran tradisi, kearifan lokal, dan budaya dalam masyarakat global; serta komitmen menjaga dan melestarikan tradisi, kearifan lokal, serta budaya Indonesia dalam masyarakat global. Pada bab 5 mengenai menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia komponen pengetahuan dijabarkan dengan komitmen untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia, upaya untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan Indonesia, tantangan dalam upaya mempertahankan wilayah negara kesatuan republik Indonesia, menumbuhkan kesadaran untuk menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia, dan peran aktif peserta didik dalam menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia.

Komponen keterampilan mencakup keterampilan umum dan keterampilan partisipatif. Adapun komponen keterampilan tersebut dalam buku teks pelajaran kelas IX dijabarkan sebagai berikut. Pada bab 1 pengembangan komponen keterampilan dimuat dalam fitur-fitur buku seperti “ayo, membaca”, “ayo, bermain”, “ayo, bercerita”, “ayo, mengamati”, “ayo, tampilkan”, “ayo, berdiskusi”, “ayo, membaca”, “uji kompetensi”, “pengayaan”, dan “refleksi”. Pada bab 2 pengembangan komponen keterampilan dimuat dalam fitur buku seperti “ayo, mengamati”, “ayo, berdiskusi”, “ayo, tampilkan”, “ayo, berlatih”, “ayo, berkreasi”, “uji kompetensi”, “pengayaan”, dan “refleksi”. Kemudian pada bab 2 ini juga dimuat proyek kewarganegaraan sebagai pengembangan keterampilan partisipatif.

Pada bab 3 pengembangan komponen keterampilan dimuat dalam fitur buku seperti “ayo, membaca”, “ayo, berpendapat”, “ayo, berdiskusi”, “ayo, berkirip pesan”, “ayo, menyimak”, “ayo, berlatih”, “ayo, menulis”, “uji kompetensi”, “pengayaan”, dan “refleksi”. Pada bab 4 pengembangan

komponen keterampilan dimuat dalam fitur buku seperti “ayo, mencari informasi”, “ayo, mengamati”, “ayo, menganalisis”, “ayo, menyimak”, “ayo, membaca”, “uji kompetensi”, “pengayaan”, dan “refleksi”. Pada bab 5 pengembangan komponen keterampilan dimuat dalam fitur buku seperti “ayo, mengamati”, “ayo, mencari informasi”, “ayo, berdiskusi”, “ayo, menyanyi”, “ayo, menyimak”, “ayo, tampilkan”, “ayo, berpendapat”, “ayo, berkreasi”, “ayo, melakukan”, “uji kompetensi”, “pengayaan”, dan “refleksi”.

Komponen nilai, sikap, dan watak/karakter dalam buku teks pelajaran kelas IX dijabarkan setiap babnya sebagai berikut. Pada bab 1 dimuat dalam menjelaskan hubungan Pancasila dengan UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan negara kesatuan republik Indonesia. Pada bab 2 dimuat dalam menerapkan hak dan kewajiban secara seimbang di berbagai bidang kehidupan. Pada bab 3 dimuat dalam menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Pada bab 4 dimuat dalam melestarikan praktik tradisi, kearifan lokal, dan budaya dalam masyarakat global. Pada bab 5 dimuat dalam berperan serta menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila SMP/MTs Kelas IX terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2023 dapat ditemukan sejumlah komponen kompetensi kewarganegaraan yang terdapat dalam buku teks pelajaran peserta didik tersebut. Komponen kompetensi kewarganegaraan dalam buku teks pelajaran tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga komponen kompetensi kewarganegaraan sebagaimana dikemukakan Doganay (2012), yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan nilai, sikap, watak/karakter (*disposition*).

Ketiga kategori tersebut di atas ditemukan komponen kompetensi kewarganegaraan berdasarkan kemunculannya yang diidentifikasi berdasarkan bab pembahasan buku teks tersebut. Pertama, komponen pengetahuan mencakup pengetahuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pengetahuan partisipatif. Kedua, komponen keterampilan mencakup keterampilan umum dan keterampilan partisipatif. Ketiga, komponen disposisi mencakup nilai, sikap, watak/karakter.

Tabel 1
Frekuensi Kemunculan Kategori Komponen Kompetensi Kewarganegaraan

Komponen Kompetensi	Kemunculan Komponen Kompetensi Kewarganegaraan	
	Kategori Komponen Kompetensi	Frekuensi = Presentase
Pengetahuan	Politik	10 = 16,39%
	Sosial	3 = 4,91%
	Budaya	6 = 9,83%
	Ekonomi	2 = 3,27%
	Partisipatif	9 = 14,75%
Keterampilan	Umum	4 = 6,55%
	Partisipatif	1 = 1,63%
Disposisi	Nilai	12 = 19,67%
	Sikap	9 = 14,75%
	Watak	5 = 8,19%

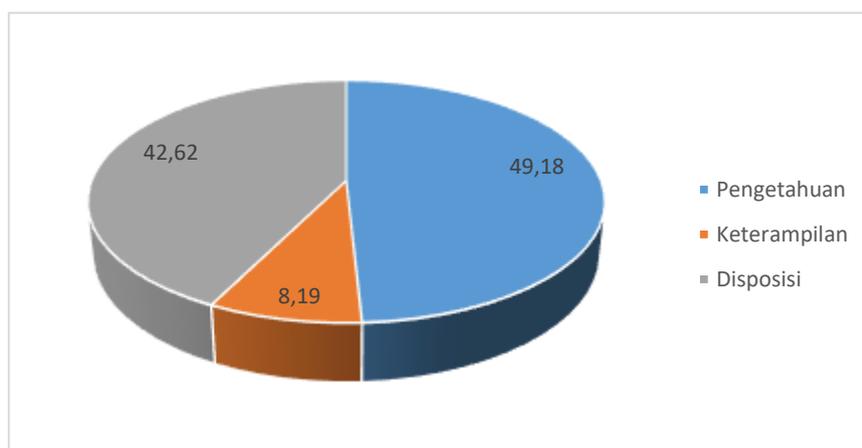
Hasil penelitian yang disajikan dalam bagian ini adalah hasil “bersih”. Proses analisis data seperti perhitungan statistik dan proses pengujian hipotesis tidak perlu disajikan.

Berdasarkan tabel di atas, komponen kompetensi kewarganegaraan yang paling banyak muncul dalam Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila Kelas IX yaitu komponen pengetahuan yang

mencakup pengetahuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pengetahuan partisipatif menjadi komponen kompetensi kewarganegaraan yang paling banyak muncul sebanyak 30 atau 49,18%. Sementara itu komponen nilai, sikap, dan watak/karakter muncul sebanyak 26 atau 42,62%. Adapun komponen keterampilan yang mencakup keterampilan umum dan keterampilan partisipatif menjadi komponen kompetensi kewarganegaraan yang paling sedikit muncul yaitu sebanyak 5 atau 8,19%.

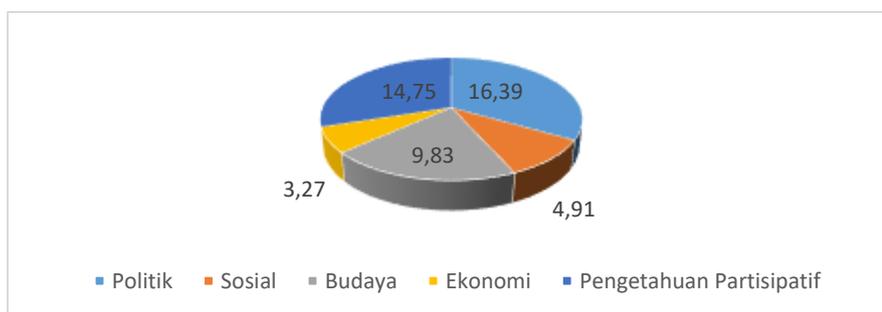
Frekuensi kemunculan komponen kompetensi kewarganegaraan yang terdapat dalam Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila kelas IX sebanyak 61 yang terbagi pada komponen pengetahuan, keterampilan, dan disposisi. Pertama, komponen pengetahuan mencakup pengetahuan politik, pengetahuan sosial, pengetahuan budaya, pengetahuan ekonomi, dan pengetahuan partisipatif. Kedua, komponen keterampilan mencakup keterampilan umum dan keterampilan partisipatif. Ketiga, disposisi mencakup nilai, sikap, dan watak/karakter.

Gambar 1
Frekuensi Kemunculan Komponen Kompetensi Kewarganegaraan



Komponen pengetahuan kategori politik menjadi yang paling banyak muncul yakni sebanyak 16,39%, sedangkan pengetahuan kategori ekonomi menjadi yang paling sedikit muncul yakni sebanyak 3,27% dari total frekuensi pengetahuan yang muncul dalam buku teks pelajaran kelas IX sebanyak 30. Adapun pengetahuan sosial sebanyak 4,91%, pengetahuan budaya sebanyak 9,83%, dan pengetahuan partisipatif sebanyak 14,75% dapat dilihat pada Gambar 2.

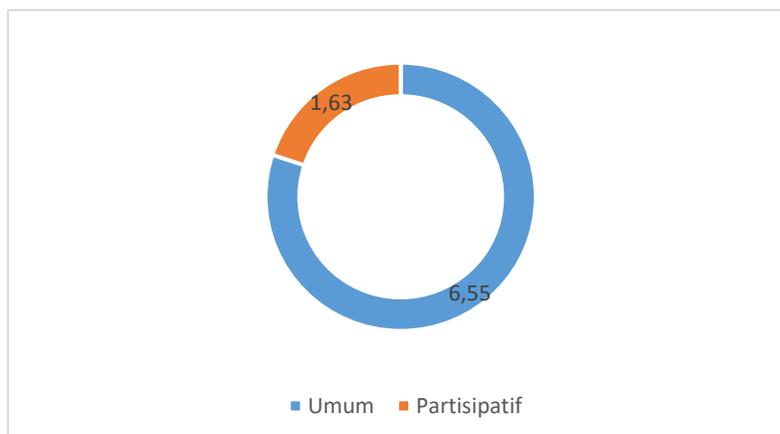
Gambar 2
Frekuensi Kemunculan Komponen Pengetahuan



Kemunculan komponen keterampilan yang mencakup keterampilan umum dan keterampilan partisipatif dalam buku teks pelajaran kelas IX sebanyak 5 frekuensi kemunculan. Adapun keterampilan umum sebanyak 6,55%, sedangkan keterampilan partisipatif sebanyak 1,63% dari total frekuensi kemunculan. Secara umum komponen keterampilan yang terdapat dalam buku teks pelajaran kelas IX menjadi komponen yang paling sedikit dibandingkan dengan kemunculan

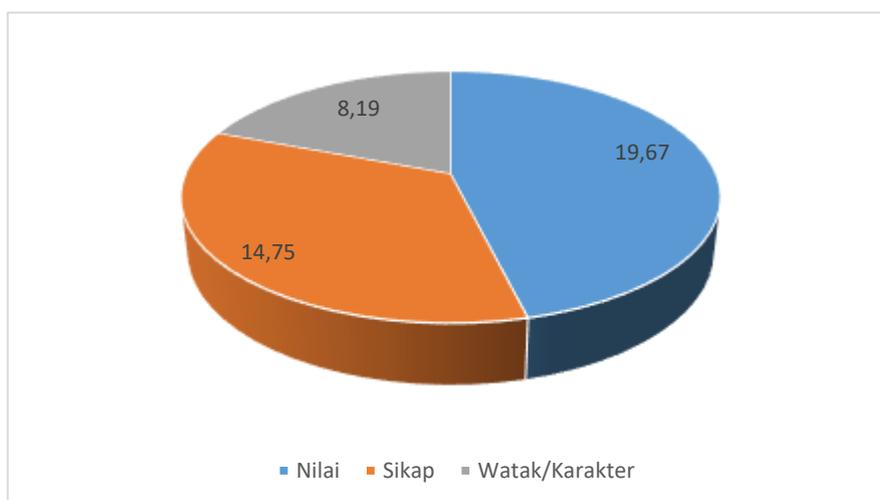
komponen pengetahuan dan komponen disposisi yang mencakup nilai, sikap, dan watak/karakter dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3
Frekuensi Kemunculan Komponen Keterampilan



Kemunculan komponen disposisi yang mencakup nilai, sikap, dan watak/karakter sebanyak 42,62% dari total frekuensi kemunculan sebanyak 26. Adapun kategori nilai sebanyak 19,67%, sikap sebanyak 14,75%, dan watak/karakter sebanyak 8,19% dari total keseluruhan frekuensi komponen disposisi dalam buku teks pelajaran kelas IX. Adapun komponen nilai, sikap, dan watak/karakter dapat dilihat pada Gambar 4.

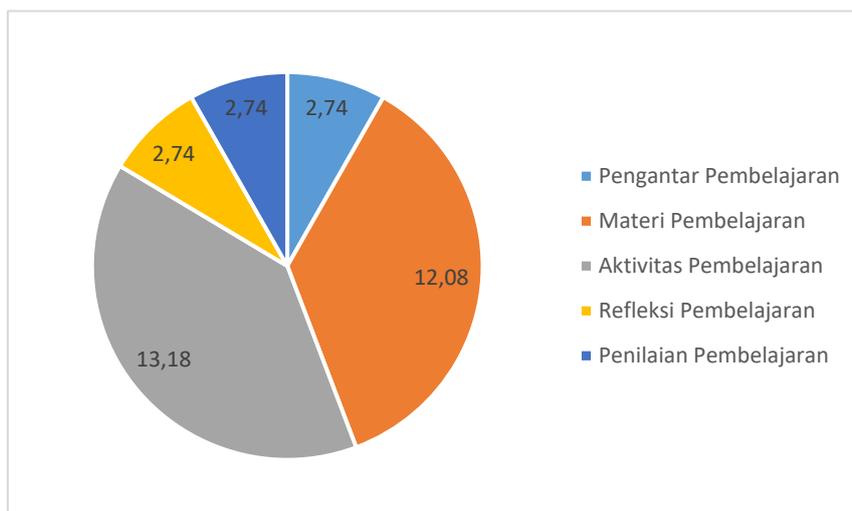
Gambar 4
Frekuensi Kemunculan Komponen Disposisi (Nilai, Sikap, dan Watak/Karakter)



Penjabaran komponen kompetensi kewarganegaraan dalam Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila SMP/MTs kelas IX dapat diuraikan dengan gambar dan presentase sebagai berikut.

Gambar 5

Penjabaran Komponen Kompetensi Kewarganegaraan



Berdasarkan gambar di atas, jumlah komponen kompetensi kewarganegaraan pada pengantar pembelajaran sebanyak 2,74%, materi pembelajaran sebanyak 12,08%, aktivitas pembelajaran sebanyak 13,18%, refleksi pembelajaran sebanyak 2,74%, dan penilaian pembelajaran sebanyak 2,74%. Penjabaran komponen kompetensi kewarganegaraan yang memiliki kemunculan paling banyak terdapat dalam buku teks pelajaran kelas IX adalah aktivitas pembelajaran yaitu sebanyak 13,18%. Sementara penjabaran komponen kompetensi kewarganegaraan yang memiliki frekuensi kemunculan paling sedikit terdapat pada pengantar pembelajaran, refleksi pembelajaran, dan penilaian pembelajaran masing-masing sebanyak 2,74%.

Simpulan

Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila tingkat SMP/MTs kelas IX memuat komponen kompetensi kewarganegaraan meliputi: (1) komponen pengetahuan mencakup pengetahuan politik, pengetahuan sosial, pengetahuan budaya, pengetahuan ekonomi, dan pengetahuan partisipatif; (2) komponen keterampilan yang mencakup keterampilan umum dan keterampilan partisipatif; dan (3) komponen disposisi mencakup nilai, sikap, dan watak/karakter. Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila kelas IX memuat semua indikator komponen kompetensi kewarganegaraan demokratis aktif. Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila kelas IX yaitu sebanyak 61 dengan frekuensi kemunculan komponen kompetensi kewarganegaraan yang paling banyak adalah komponen pengetahuan sebanyak 30 atau 49,18%. Sementara komponen kompetensi kewarganegaraan yang memiliki frekuensi kemunculan paling sedikit adalah komponen keterampilan sebanyak 5 atau 8,19%. Penjabaran muatan komponen kompetensi kewarganegaraan pada ketiga Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila Kelas IX dijabarkan melalui pengantar pembelajaran, materi pembelajaran, aktivitas pembelajaran, refleksi pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Muatan komponen kompetensi kewarganegaraan yang dijabarkan melalui pengantar pembelajaran sebanyak 8,19%, materi pembelajaran sebanyak 36,06%, aktivitas pembelajaran sebanyak 39,34%, refleksi pembelajaran sebanyak 8,19%, dan penilaian pembelajaran sebanyak 8,19%.

Referensi

- Ayudi, M.D. (2019). *Analisis Muatan Sikap Spiritual dan Sikap Sosial dalam Buku Teks PPKn Kurikulum 2013*. [Tesis, tidak diterbitkan]. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Belladonna, A.P., & Anggraena, S.N. (2019). Penguatan pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge) dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 196-210. <https://doi.org/10.31571/pkn.v3i2.1442>.
- Campbell, D. E. (2019). What social scientists have learned about civic education: A review of the literature. *Peabody Journal of Education*, 94, 32-47. <https://doi.org/10.1080/0161956X.2019.1553601>.
- Coopmans, M., van der Veen, I., & Daas, R. (2024). Critical-democratic citizenship in Dutch tertiary vocation education: Analyzing opportunities for growth. *Citizenship, Social and Economics Education*, 22(3), 152-171. <https://doi.org/10.1177/14788047231225376>.
- Daas, R., Dam, G. T., Dijkstra, A. B., Karkdijk, E., Naaijer, H., & van der Veen, I. (2023). *Burgerschap in beeld: Burgerschapscompetenties en burgerschapsonderwijs in vergelijkend perspectief*. Amsterdam University Press.
- Doganay, A. (2012). A Curriculum Framework for Active Democratic Citizenship Education. In M. Print., & D. Lange (Eds.), *Schools, Curriculum and Civic Education for Building Democratic Citizens* (Vol. 2, pp. 19-39). Sense Publishers. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-6209-167-2_3.
- Feriandi, Y. A., & Harmawati, Y. (2018). Analisis penguasaan kompetensi kewarganegaraan pada mahasiswa PPKn Universitas PGRI Madiun. *Jurnal Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 76-83. <http://dx.doi.org/10.12928/citizenship.v1i2.13620>.
- Hartini, A., & Petrus, S. (2020). Peran guru PKN dalam membina civic skill siswa sekolah menengah pertama negeri 7. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(1), 127-137. <https://doi.org/10.31932/jpbs.v5i1.746>.
- Jamaludin., & Alanur, S.N. (2021). Pengembangan civic knowledge dan literasi informasi di masa pandemi Covid-19 melalui case method pada mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Hasil Penelitian maupun Pemikiran Kritis*, 11(1), 28-36. <http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v11i01.10083>.
- Jamaludin, Alanur, S. N., & Hasdin. (2023). Penerapan civic skills melalui model blended learning dalam membangun karakter kewarganegaraan pada mahasiswa. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 20(1), 91-98. <https://doi.org/10.17509/jap.v28i3.39983>.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 25 Tahun 2022*, tentang Penilaian Buku Pendidikan.
- Knowles, R. T., Torney-Purta, J., & Barber, C. (2018). Enhancing citizenship learning with international comparative research: Analyses of IEA civic education datasets. *Citizenship Teaching and Learning*, 13(1), 7-30. https://doi.org/10.1386/ctl.13.1.7_1.
- Manalu, A., & Gandamana, A. (2023). Analisis kompetensi kewarganegaraan dalam kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada tingkat

sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(3), 10267-10285. Retrieved from <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/447>.

Mulyono, B. (2017). Reorientasi civic disposition dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya membentuk warga negara yang ideal. *Jurnal Civics*, 14(2), 218-225. <http://dx.doi.org/10.21831/civics.v14i2.17007>.

Murdiono, M. (2010). Peningkatan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) melalui penerapan strategi pembelajaran berbasis masalah. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 3(1), 16-29. <http://dx.doi.org/10.21831/jpipfip.v0i0.4624>.

Pusat Kurikulum Pendidikan Nasional. (2007). *Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan*. Departemen Pendidikan Nasional.

Ramanta, H. (2020). *Analisis Nilai-Nilai Multikultural dalam Buku Teks Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. [Tesis, tidak diterbitkan]. Universitas Negeri Yogyakarta.

Saputra, R., Adha, M. M., Mentari, A., & Rohman. (2023). Pengaruh kecerdasan interpersonal terhadap civic disposition mahasiswa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(5), 145-153. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i5.1693>.

Shelina, N., Yanzi, H., & Mentari, A. (2019). Peran pembelajaran PPKn dalam membentuk sikap demokratis untuk meningkatkan civic disposition siswa. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(2), 1-13. <https://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/19176>.

Solehudin, I. (2019). *Analisis Buku Teks PPKn Kelas VII dalam Perspektif Penguatan Pendidikan Karakter*. [Tesis, tidak diterbitkan]. Universitas Pendidikan Indonesia.

Sunarso. (2021). *Politik Pendidikan Tiga Rezim (1st ed)*. CV. Indotama Solo.

Sunarso. (2024). *Dinamika pendidikan kewarganegaraan di Indonesia*. Disampaikan dalam Seminar Nasional Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka Jakarta.

Suryatna, Y., Sumartini, A. T., Sari, D. P., & Ningrum, D. I. M. (2023). *Pendidikan Pancasila SMP/MTs Kelas VII*. Pusat Perbukuan Kemendikbudristek.

Tutuarima, F., Nindatu, A., & Nadifa, S. (2022). Problematika civic disposition dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan pada pembelajaran daring. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 436-443. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2514>.

Veugelers, W. (2017). Education for Critical-Democratic Citizenship: Autonomy and Social Justice in a Multicultural Society. In Aloni, N., & Weintrob, L. (Eds.) *Beyond Bystanders* (Vol. 3, pp. 47-59). Springer.

Veugelers, W., & Groot, I. de. (2019). Theory and Practice of Citizenship Education. In W. Veugelers (Eds.), *Education for Democratic Intercultural Citizenship* (Vol. 15, pp. 14-41). Brill. <http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctvrk389.6>.

Veugelers, W. (2021). A moral perspective on citizenship education and on IEA's international civic and citizenship education studies. In B. Malak-Minkiewicz & J. Torney-Purta (Eds.) *Influences of the IEA Civic and Citizenship Education Studies* (Vol. 24, pp. 291-301). Springer.

Veugelers, W., & Samsuri. (2023). *Teori dan Praktik Pendidikan Kewarganegaraan*. Penerbit Ombak.